

SKRIPSI



**ANALISIS PENGELOLAAN UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN DALAM PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA KEDEPUTIAN BIDANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
ASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Disusun Oleh:

**NAMA : DAYU ARIYANTI
NPM : 2032321127
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024



**ANALISIS PENGELOLAAN UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN DALAM PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA KEDEPUTIAN BIDANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
ASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan dalam Ilmu Administrasi Bisnis**

Oleh:

**NAMA : DAYU ARIYANTI
NPM : 2032321127
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

NAMA : DAYU ARIYANTI
NPM : 2032321127
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN DAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DALAM
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA KEDEPUTIAN BIDANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
LEMBAGA ADMINISTRASINEGARA

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan

Pada, 24 Oktober 2024

Pembimbing

(Prof.Dr. R. Luki Karunia, SE, Ak, MA, CA,CACP)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 14 November 2024.

Ketua Merangkap Anggota



(Tintin Sri Murtinah, SE, MM)

Sekretaris Merangkap Anggota



(Nurmita Sari, SE, MM)

Anggota



(Prof. Dr. R. Luki Karunia, SE, Ak, MA, CA, CACP)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dayu Ariyanti

NPM : 2032321127

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **ANALISIS PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KEDEPUTIAN BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 14 November 2024



Dayu Ariyanti

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kedeputian Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara.

Penyusunan skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Terapan konsentrasi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP) pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. R Luki Karunia, SE., Ak., MA.,CA.CACP selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberi tenaga, motivasi, waktu dan kesabarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak Muhammad Rizki, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP) Politeknik STIA LAN Jakarta
3. Ibu Dra. Army Winarty, M.Si. selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara
4. Ibu Dwi Ariany, S.Sos., M.Si, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku atasan Poksi Keuangan
5. Ibu Perwita, SE, M.Ak., Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda selaku atasan Poksi Keuangan
6. Ibu Mardiana, S.A.P., Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, selaku atasan Poksi Keuangan
7. Rekan-rekan kerja pada Poksi Keuangan Lembaga Administrasi Negara yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Suami serta anak-anak saya tersayang yang selalu memberikan dukungan dan waktu nya untuk penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Annisa Fathonah teman seperjuangan dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan yang selalu memberikan dukungannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Jakarta, November 2024

Peneliti,

DAYU ARIYANTI



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan termasuk ke dalam penilaian Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dalam hal ini mempunyai bobot nilai indikator sebesar 10% sesuai dengan petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga. Permasalahan yang terjadi belum tercapainya nilai target yang ditetapkan dalam pengelolaan UP dan TUP dalam pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan dalam pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada ke deputian bidang kebijakan dan pengembangan kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada ke deputian bidang kebijakan dan pengembangan kompetensi ASN dibagi menjadi 3 Aspek yaitu, ketepatan waktu, persentase GUP dan Setoran TUP. Dari Aspek ketepatan waktu pengelolaan Uang Persediaan, belum mencapai target yang telah ditetapkan LAN. Sedangkan dari aspek persentase GUP terdapat penurunan nilai pengelolaan Uang Persediaan dari tahun 2021 s/d 2023, hal ini disebabkan besarnya nilai UP dan pada tahun 2021 dan 2022 terjadi pandemic covid 19. Pada persentase besaran TUP tidak ada, dikarenakan tidak adanya pengajuan TUP dari tahun 2021 s/d 2023. Saran peneliti adalah adanya pengurangan besaran nilai Uang Persediaan yang ada pada ke deputian bidang kebijakan dan pengembangan kompetensi ASN dan komitmen unit kerja dalam pengelolaan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Anggaran; pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan; nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Management of Reserve Money and Additional Reserve Money is included in the assessment of Budget Implementation performance indicators which in this case have an indicator value weight of 10% in accordance with the technical instructions for assessing performance indicators for budget implementation of state ministries/institutions. The problem that occurs is not achieving the target values set in the management of UP and TUP in achieving Budget Implementation Performance Indicators. The aim of this research is to determine the management of money supplies and additional money supplies in achieving budget implementation performance indicator values for deputies in the field of policy and development of ASN competency for State Administration Institutions. The research method used is descriptive qualitative and data collection techniques through interviews and document review. The research results obtained from the management of supply money and additional supply money at the deputy for policy and ASN competency development were divided into 3 aspects, namely, timeliness, GUP percentage and TUP deposits. From the aspect of timeliness of Money Inventory management, it has not reached the target set by LAN. Meanwhile, from the GUP percentage aspect, there is a decrease in the value of the Management of Stock Money from 2021 to 2023, this is due to the large UP value and in 2021 and 2022 the Covid 19 pandemic occurred. In terms of the percentage, the TUP amount does not exist, due to the absence of TUP applications from 2021. 2021 to 2023. The researcher's suggestion is to reduce the value of the Money Inventory available to the deputy in the field of policy and develop ASN competency and work unit commitment in managing financial responsibility in accordance with the plans and targets that have been set.

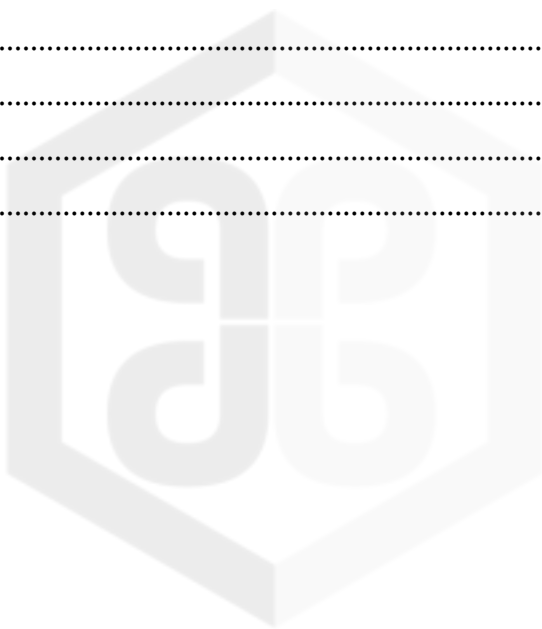
Keyword: Budget; Management of cash supplies and additional cash supplies; value of performance indicators of budget implementation.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I. PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	8
B. Konsep Kunci	38
C. Kerangka Berpikir	40
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian.....	41
B. Teknik Pengumpulan Data	42
C. Instrumen Penelitian.....	46
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	47

BAB IV. HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Gambaran Umum Lembaga Administrasi Negara	49
2. Visi dan Misi Lembaga Administrasi Negara	51
3. Struktur Organisasi Lembaga Administrasi Negara	52
4. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	55
B. Penyajian Data	57
C. Pembahasan	65
D. Sintesis Pemecahan Masalah	74
 BAB V. PENUTUP	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	


POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan 2023	4
Tabel 2.1 Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	22
Tabel 2.2 Target Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja	24
Tabel 2.3 Formula Perhitungan IKPA	24
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Daftar Key Informant	43
Tabel 3.2 Instrument Penelitian	46
Tabel 4.1 Daftar GUP Tahun 2021	60
Tabel 4.2 Daftar GUP Tahun 2022	61
Tabel 4.3 Daftar GUP Tahun 2023	62
Tabel 4.4 Rekap GUP Satker LAN Jakarta Triwulan I.....	63
Tabel 4.5 Rekap GUP Satker LAN Jakarta Triwulan II	63
Tabel 4.6 Rekap GUP Satker LAN Jakarta Triwulan III	64
Tabel 4.7 Rekap GUP Satker LAN Jakarta Triwulan IV	64
Tabel 4.8 Persentase ketepatan waktu GUP.....	67
Tabel 4.9 Persentase GUP Tahun 2021.....	69
Tabel 4.10 Pesentase GUP Tahun 2022.....	70
Tabel 4.11 Persentase GUP Tahun 2023.....	71

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Administrasi Negara.....	55
Gambar 4.2 Struktur Deputy Bidang Kebijakan Bangkom ASN	57
Gambar 4.3 Sintesis Pemecahan Masalah.....	74



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Nilai Pengelolaan UP dan TUP Tahun 2021- 2023.....	3
Grafik 1.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021-2023	5
Grafik 4.1 Nilai Pengelolaan UP dan TUP Tahun 2021- 2023.....	72
Grafik 4.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021-2023.....	73



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BP	: Bendahara Pengeluaran
BPP	: Bendahara Pengeluaran Pembantu
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GU	: Ganti Uang
GUP	: Ganti Uang Persediaan
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KUN	: Kas Umum Negara
LPJ	: Laporan Pertanggung Jawaban
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non Kementerian
NKPA	: Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran
OMSPAN	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPSPM	: Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
PA	: Pengguna Anggaran
RKA K/L	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RPD	: Rencana Penarikan Dana
Satker	: Satuan Kerja
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPBy	: Surat Perintah Bayar
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UP	: Uang Persediaan

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan pengelolaan keuangan negara agar pengelolaan keuangan negara bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur maka semakin tinggi pula pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengolahan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini disusun dalam upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, sebagai tindak lanjut dikeluarkan nya Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan di bidang pengelolaan keuangan.

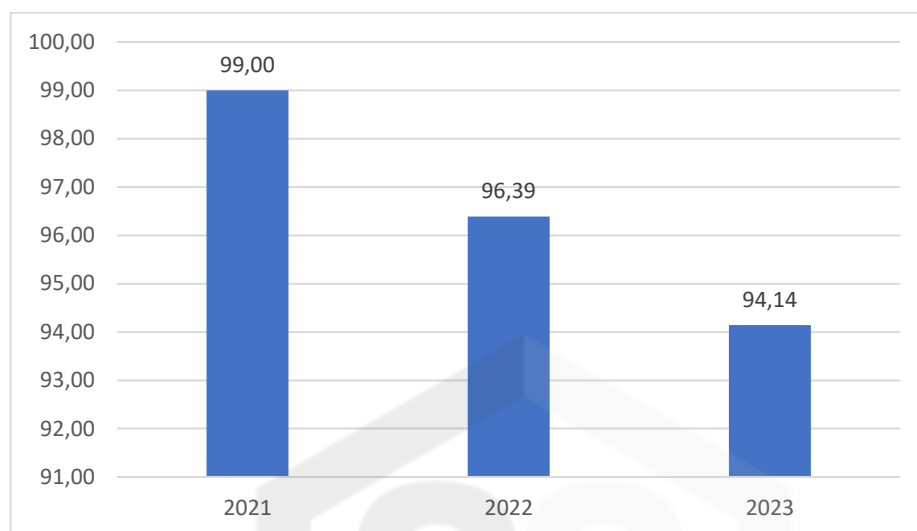
APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4. Agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien APBN harus dikelola dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat pada tingkat realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana. Pembayaran beban atas dana APBN memiliki dua mekanisme yaitu pencairan dana melalui pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan (UP). Pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan memiliki perbedaan yaitu pencairan dana langsung digunakan untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai, sedangkan pencairan dana uang persediaan digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dibayarkan melalui pencairan dana langsung.

Dalam rangka melancarkan kegiatan pemerintahan yang berjalan dengan lancar dan baik, pencairan dana anggaran baik pencairan dana langsung maupun pencairan dana uang persediaan harus dilakukan seefisien mungkin. Perbendaharaan memiliki fungsi perencanaan kas yang baik untuk pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, bahwa dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, perlu mengatur kembali penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebutkan Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan merupakan salah satu data atau informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan merupakan Indikator dalam Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga. Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mempunyai bobot 10% terhadap kinerja pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Pada tahun 2022 terdapat perubahan Tata Cara Pengukuran dan Penilaian untuk Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan. Sebelumnya Indikator tersebut hanya dinilai berdasarkan ketepatan waktu Pertanggung jawaban Uang Persediaan (GUP). Berdasarkan Perdirjen No. 5 Tahun 2022 Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan diukur berdasarkan 3 Komponen, antara lain:

1. Komponen Ketepatan Waktu
2. Komponen Persentase GUP
3. Komponen Setoran TUP



Grafik 1.1 Nilai Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun 2021 – 2023

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

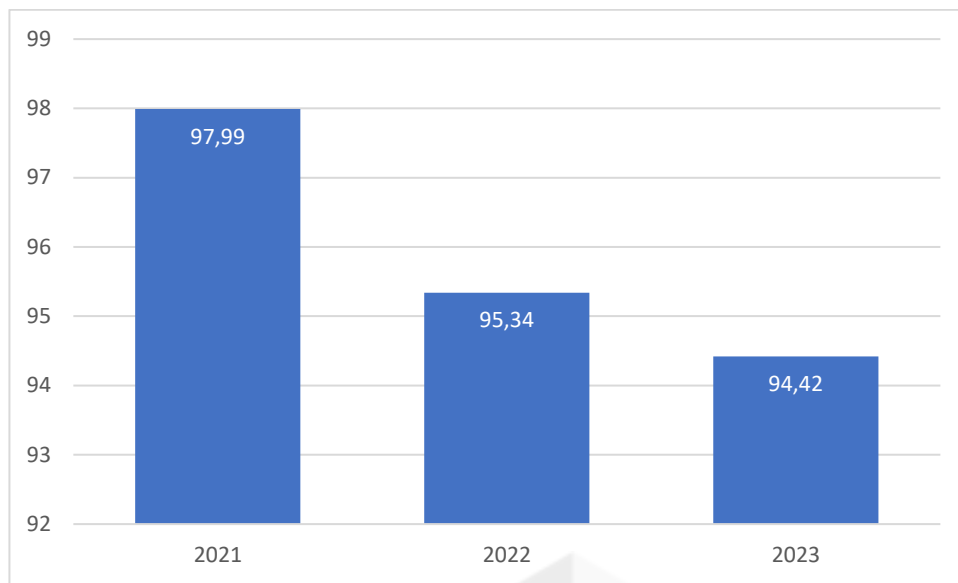
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat terdapat penurunan nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan dari tahun 2021 sebesar 99,00 menjadi 96,39 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan turun kembali yaitu sebesar 94,14. Untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan pada Lembaga Administrasi Negara Jakarta menindaklanjutinya dengan menetapkan target nilai indikator pelaksanaan anggaran sebesar 97,99 tahun 2022 dan 95 pada tahun 2023 seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun nilai indikator pelaksanaan anggaran pada Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tahun 2022 dan 2023 pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Revisi DIPA	10	100	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	10	80,18	71,8
3	Penyerapan Anggaran	20	92,14	93,17
4	Belanja Kontraktual	10	92,5	92,04
5	Penyelesaian Tagihan	10	100	100
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	96,39	94,14
7	Dispensasi SPM	5	100	100
8	Capaian Output	25	100	99,97
	Nilai IKPA		95,34	94,42

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Indikator kinerja pelaksanaan yang digunakan ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Perdirjen 5/PB/2022 merupakan perubahan atas Perdirjen 4/PB/2021, perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Adapun perubahan tersebut berupa eliminasi atas beberapa indikator dimana sebelumnya pada tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) indikator menjadi 8 (delapan) indikator serta reformulasi perhitungan nilai pada beberapa indikator pada tahun 2022.



Grafik 1.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 – 2023

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Penurunan nilai tersebut berdampak terhadap turunnya nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Penurunan nilai pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Keterlambatan proses revolving UP pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan karena masa pandemi covid 19 yang berakibat pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana.
2. Adanya penambahan besaran uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara pada Kedeputan Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN pada tahun 2023 dari Rp150.000.000,- menjadi Rp180.000.000,-. Penambahan tersebut menyebabkan persentase GUP dalam sebulan tidak mencapai 100% setiap bulannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kedeputan Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Jakarta”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Jakarta dari aspek ketepatan waktu?
2. Bagaimana Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Jakarta dari aspek persentase Ganti Uang Persediaan (GUP)?
3. Bagaimana Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Jakarta dari aspek persentase setoran Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Jakarta dari aspek ketepatan waktu
2. Mengetahui Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Jakarta dari aspek persentase Ganti Uang Persediaan (GUP).
3. Mengetahui Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kedeputian Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi

Negara Jakarta dari aspek persentase setoran Tambahan Uang Persediaan (TUP)

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat melakukan penelitian melalui skripsi ini, yaitu: bagi kepentingan dunia akademis dan praktis, sebagai berikut.

a. Bagi Kepentingan Dunia Akademisi

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya dalam pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Instansi Pemerintah.
2. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

b. Bagi Kepentingan Dunia Praktik

1. Bagi Instansi diharapkan sebagai evaluasi untuk pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) dalam Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kedeputan Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan terkait pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Kedeputan Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara.
3. Bagi Pembaca atau peneliti lainnya diharapkan dapat di manfaatkan untuk melakukan penelitian dengan bahasan lebih mendalam terkait Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran.